



PROSES BISNIS

*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR*



PERMENPAN 19 Tahun 2018

Tentang Proses Bisnis, merupakan panduan teknis dalam penyusunan proses bisnis berbasis kinerja

DASAR HUKUM

01

Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

02

Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran negara RI Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran RI Nomor 123);

01



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

02



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

03



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);

04



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

05



Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

06



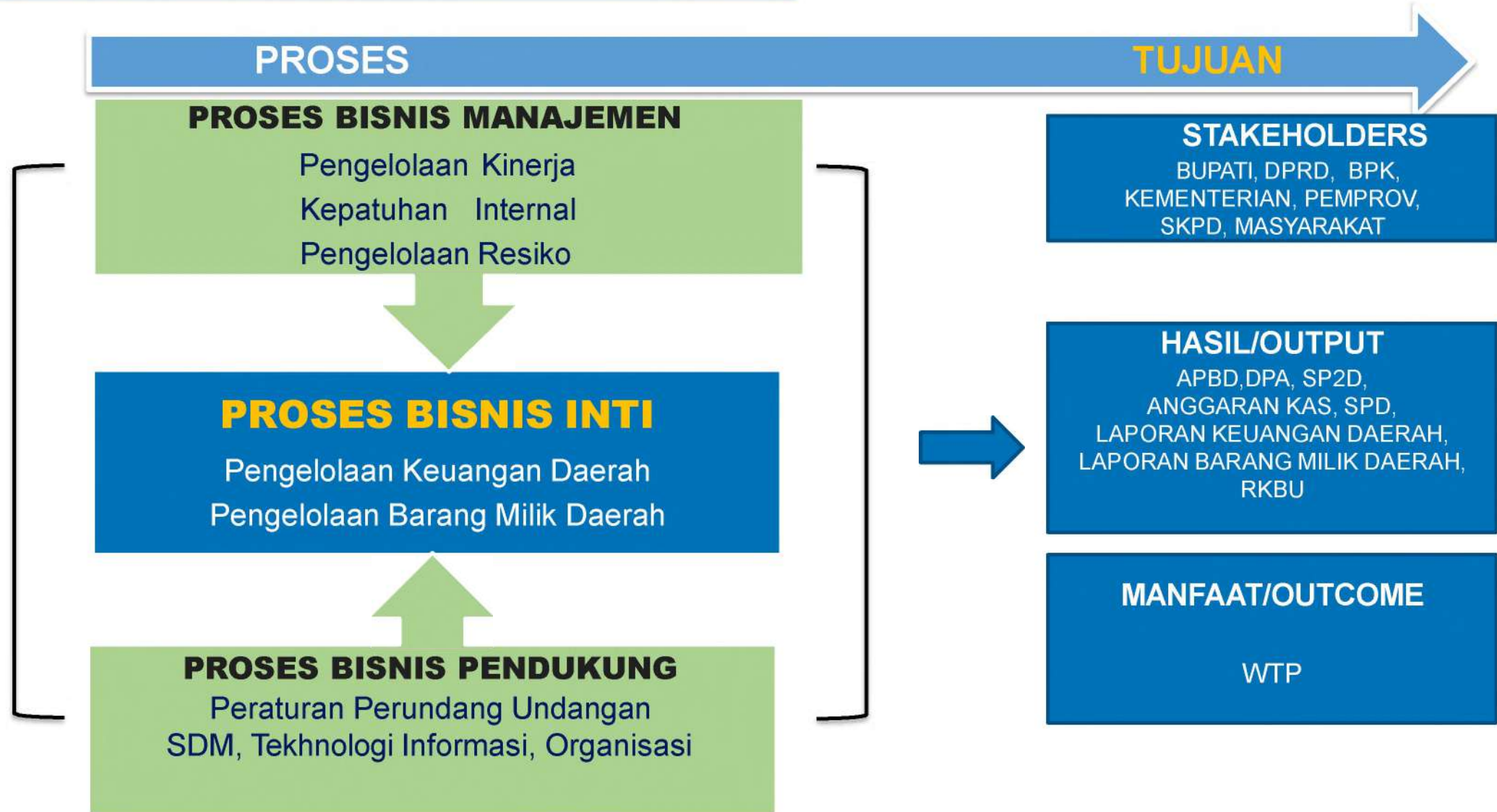
Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

07

SKEMA PROSES BISNIS

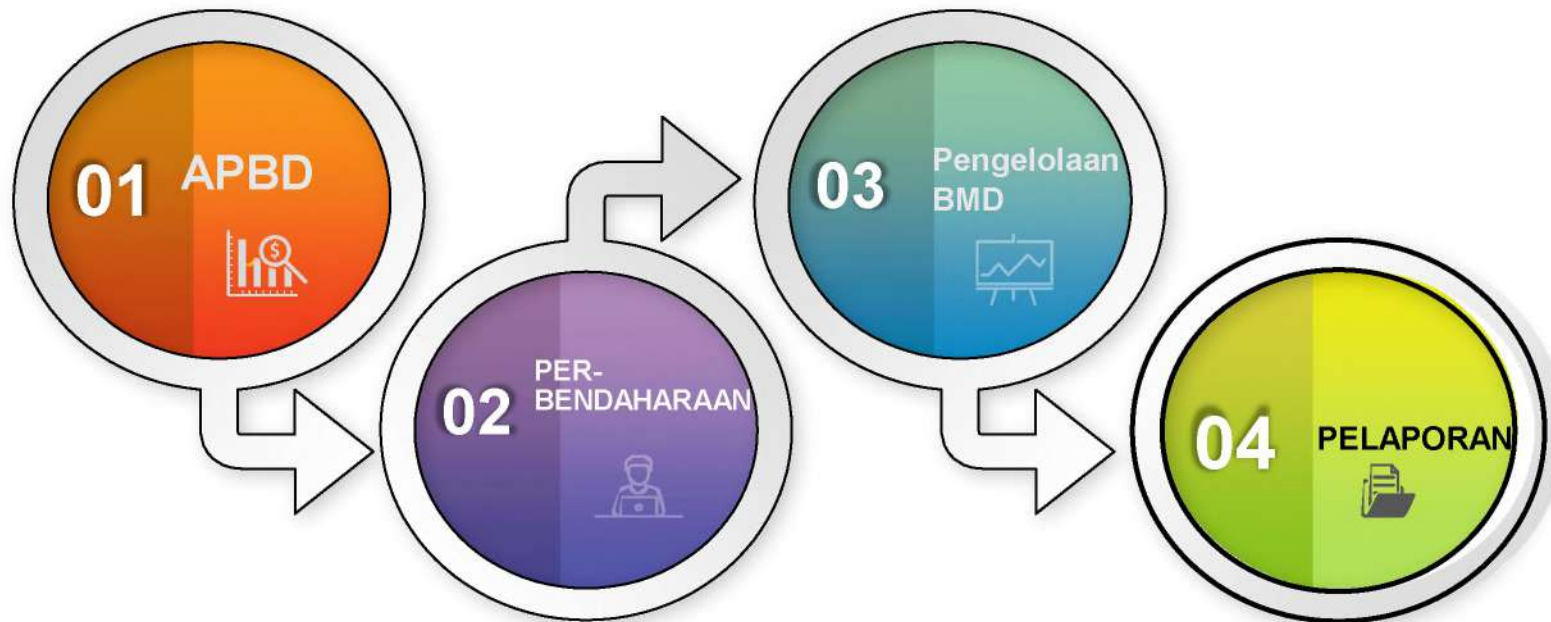
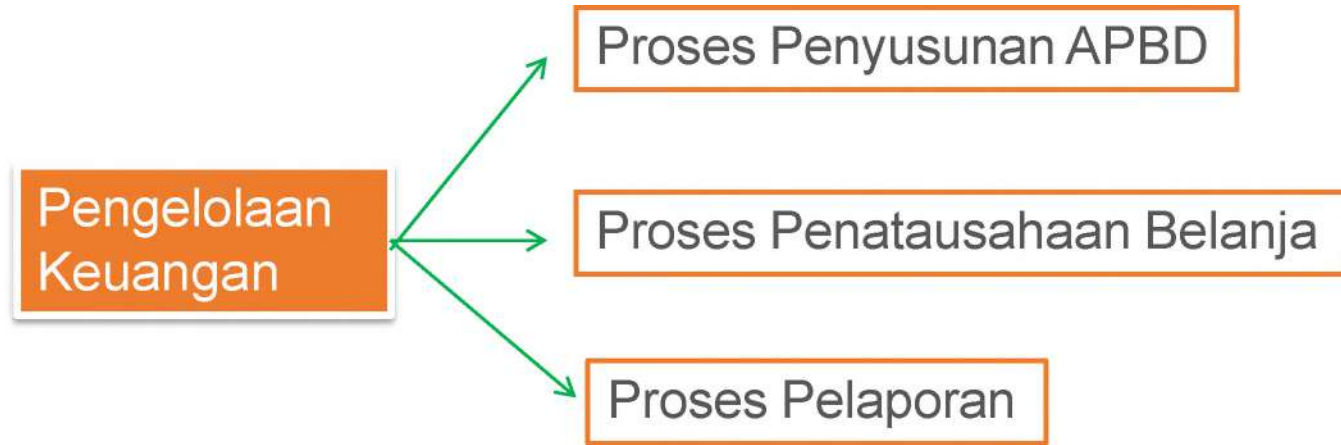


SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKAD



PROSES BISNIS INTI

1. Pengelolaan Keuangan



2. Pengelolaan Barang Milik daerah



PROSES BISNIS PENDUKUNG

